BAB III

PEMBAHASAN

Desa Wisata di berbagai daerah di Indonesia dikembangkan dengan cara yang baik agar dapat menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut sehingga nantinya dapat menambah pendapatan daerah untuk pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Terpeliharanya objek wisata di berbagai daerah sangat ditentukan oleh pemeliharaan dan pengawasan pihak yang terkait sepeti dinas pariwisata. Hal yang sama juga dilakukan pada objek wisata yang ada di daerah Kabupaten Wajo yang dimana seluruh objek wisata dikembangkandibawah pelaksanaan dan pengawasan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Baik buruknya objek wisatadi Kabupaten Wajo sangat tergantung pada kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo itu sendiri dalam meningkatkan dan memelihara objek wisatanya berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan di daerah tersebut.

A. Kinerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam Mengembangkan Desa Wisata tahun 2014

Kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo dibentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemuda dan Olahraga didaerah. Dispora dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dispora mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam Hal Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisataan

Pada bagian ini penulis secara ekplisit akan menyampaikan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo Berorientasi pada Hasil yang Bermanfaat untuk Kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. Untuk melihat hasilnya penulis memetakan kedalam 5 (lima) indicator penilaian yaitu:

1. **Aspek Produktifitas**

   Aspek produktifitas adalah aspek yang memiliki peran yang penting dalam organisasi publik, karena berkaitan dengan perbandingan antara input dan output. Aspek produktifitas juga merupakan ukuran bagi birokrasi dalam menghasilkan suatu keluaran yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

   Pada aspek ini dilihat produktifitas Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo di dalam mengembangkan Desa Wisata sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hal tersebut menyangkut upaya yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo untuk pencapaian hasil dan meningkatkan kualitas desa wisata dengan

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dalam visi Kabupaten Wajo tahun 2014-2019 yaitu:

"Wajo sebagai daerah tujuan wisata, berbudaya serta kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing".

Sejalan dengan visi diatas kemudian pemerintah menetapkan tujuan dari visi diatas antara lain:

1. Menambahkan objek wisata baru
2. Meningkatkan pengenalan masyarakat atas daya Tarik objek wisata

Dari penjabaran tujuan visi pembangunan daerah kabupaten wajo, terlihat bahwa sudah adanya keingingan pemerintah untuk sektor pariwisata. Hal tersebut kemudian Dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ada dua program yang menjadi fokus utama dinas untuk membuat berkembangnya objek wisata dikabupaten ini. Seperti yang terteta pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Program dan indikator program Bidang Pariwisara

Program	Indikator Program
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Domestik
	Jumlah Pemanfaatan jenis media informasi dalam pemasaran pariwisata
	Jumlah event promosi yang diikuti
Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan/direhabilitasi

Sumber: Renstra Disporabudpar 2014

Berdasarkan tabel diatas peneliti menyimpulkan sudah adanya upaya pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan produktifitas dari objek wisata yang ada. Namun setelah melihat program yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah tahun 2014 pemerintah kabupaten wajo tidak adanya target atau pencapaian program yang berkenaan dengan produktifitas di sektor pariwisata, adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebagaimana yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengunjung Wisata Kabupaten Wajo 2012-2014

Tahun	Jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan Desa Salomenraleng	presentase
2012	3.014	1.507	50%
2013	3.491	2.304	66%
2014	4.811	3.608	75%

Sumber: Lakip 2014

Berdasarkan tabel diatas kunjungan wisatawan Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kunjungan jumlah wisatawan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan mencapai 3.491 wisatawan, hal tersebut menandakan adanya peningkatan di tahun 2013 sejumlah 477 wisatawan. Pada tahun 2014 kenaikan jumlah wisatawan mencapai 4.811, hal tersebut menandakan tingginya jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya sebesar 1.320 wisatawan. Hingga saat ini berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo untuk menaikkan jumlah kunjungan pada objek wisata baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun.

Desa wisata Salomenraleng Danau Tempe ini merupakan tempat wisata yang sangat diminati wisatawan lokal maupun mancanegara karena hampir semua wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Wajo tertarik dengan pesona alam Danau Tempe dan keunikan rumah terapungnya. Dilihat dari jumlah pengunjung wisatawan Kabupaten Wajo pada tabel 2.3 pengunjung yang berkunjung ke desa Salomenraleng Danau Tempe sebesar 75% dari total kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wajo pada tahun 2014. Sebagaimana disampaikan pada wawancara langsung bersama Kepala Disporabudpar Drs. H. Andi Darmawansyah, M. Si pada tanggal 4 Juni 2016 beliau menjelaskan:

"*Pariwisata ini adalah salah satu sumber PAD kami khususnya desa Salomenraleng Danau Tempe yang memiliki perhatian lebih dari wisatawan yang berkunjung ke Wajo, meskipun sumbangannya masih kecil dikarenakan masih minimnya promosi yang dilakukan. Tapi untuk tahun ini jumlah kunjungan wisatawan kami tahun ini masih kami rasa kurang. Tapi untuk tahun berikutnya kami akan menyiapkan promosi secara besar-besaran di berbagai media, baik cetak atau pun online*".

Dari wawancara diatas, menurut pihak Disporabudpar Kabupaten Wajo jumlah tersebut masih kurang sesuai dengan apa yang di targetkan. Salah satu permasalahannya belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri. Tidak bisa dipungkiri arus wisatawan mancanegara & domestic yang masuk ke Kabupaten Wajo khususnya desa Salomenraleng Danau Tempe semakin tahun semakin meningkat, namun dari target kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan belum optimal mencapai apa yang diharapkan. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun lalu antara lain seperti pameran, event, festival, promosi melalui pemanfaatan

berbagai teknologi informasi dan presentasi budaya daerah serta berbagai bentuk kegiatan promosi lainnya masih belum efektif untk menarik minat kunjungan wisatawan. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa faktor kunci yang harus ditanggulangi berkaitan dengan kegiatan promosi pariwisata adalah menambahkan paket materi pariwasata yang dipromosikan, meningkatkan nilai daya tarik desa Salomenraleng Danau Tempe, melengkapi sarana dan prasarana obyek wisata sesuai standar kebutuhan wisatawan. Upaya tersebut kemudian diharapkan mampu memberikan *multiflier effect* berupa belanja wisatawan sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu berkaca pada periode renstra terdahulu, faktor ketersediaan produk usaha yang bergerak dibidang kepariwisataan daerah kabupaten Wajo masih sangat terbatas. Hal ini dilihat dari data-data yang ada yakni 13 jenis usaha pariwisata yang ditetapkan melalui UU no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, masih terdapat beberapa jenis usaha pariwisata yang belum ada diantaranya usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha penyelenggara hiburan dan rekreasi. Faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan produktifitas.

Meskipun masih kurangnya ketersediaan produk usaha yang bergerak dibidang usaha masih kurang optimal namun kunjungan pariwisata cukup ramai. Salah satu objek wisata yang di kembangkan oleh dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ialah wisata desa Salomenraleng.

Tabel 3.3

Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 2014

No.	Objek wisata	Jumlah kunjungan	Persentase
1.	Danau Tempe	2.608	54,21%
2.	Goa Nippon	160	3,32%
3.	Bukit Passanggrahan	145	3,02%
4.	Tepian Sungai Lapadduppa	516	10,73%
5.	Kawasan Wisata Atakkae	901	18,73%
6.	Budidaya Sutera	481	10,00%
	Total	4.881	

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 kunjungan wisatawan ke objek wisata Danau Tempe cukup tinggi jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya yang ada di Kec. Tempe Kabupaten Wajo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Disporabudpar Drs. H. Andi Darmawansyah, M.Si pada tanggal 4 Juni 2016 beliau menjelaskan:

"*Dari 4.811 kunjungan wisatawan pada tahun 2014, sebagian besarnya adalah kunjungan wisatawan ke objek wisata desa Salomenraleng Danau Tempe dengan total jumlah kunjungan 3.608 wisatawan dari jumlah kunjungan tahun sebelumnya hanya mencapai 2.304. Daya Tarik wisatawan memang sangat tinggi jika dibandingkan dengan objek desa wisata lainnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi masyarakat baik ide maupun tenaga yang diluangkan untuk menarik simpatik masyarakat dan wisatawan.*"

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata desa Salomenraleng dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya produktifitas sebagai implikasi dari sekian kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Wajo untuk meningkatkan produktifitas objek wisata di Kapubaten Wajo. Hal ini di dukung juga dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Salomenraleng Pak Andi Nawasir dari Desa Wisata Salomenraleng pada tanggal 6 Juni 2016 beliau menjelaskan:

> "*Kunjungan wisatawan memang terhitung banyak, untuk tahun 2014. Jika kami bandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2013. Jumlah kunjungan ini kami hitung dari jumlah tiket yang terjual kepada pengunjung. Selama ini di bantu dari dinas pariwisata untuk pengadaan karcis, selain itu kita juga di berikan beberapa arahan terkait menarik minat wisatawan. Dalam satu bulan kita ada satu kali diskusi dengan pihak pemerintah. Dalam waktu ini kita biasanya sharing terkait apa yang akan kami lakukan dan kami butuhkan untuk menjadikan wisata yang ada disini menjadi banyak peminatnya.*"

Wawancara diatas menegaskan bahwa adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan untuk objek wisata desa Salomenraleng. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata antara lain adanya koordinasi dengan baik yang terjalin antara kedua belah pihak.

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Aspek kualitas pelayanan pada indikator ini tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wisatawan maupun masyarakat yang bertempat tinggal disekitar objek wisata. Dapat kita ketahui bersama

semakin bagus tingkat pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan baik dari sisi fasilitas, sampai pada mobilitas untuk menuju suatu tempat pariwisata tersebut, maka semakin banyak dan tinggi minat kunjungan terhadap objek wisata.

Demikian pula dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berada disekitar objek wisata. Sudah menjadi bagian dari kewajiban negara dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dengan ramainya kunjungan pada suatu objek wisata maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Dalam dokumen Rencana Strategis salah satu program Disporabudpar adalah ***Program peningkatan pembangunan sarana dan prasana pariwisata.***

Infrastruktur merupakan salah satu pelayanan utama yang memiliki daya tarik bagi pengunjung pariwisata. Lokasi pariwisata yang mudah di jangkau jelas akan ramai dan sangat diminati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ini telah menjadi fokus utama oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, yang mana setiap tahunnya rata-rata mengalokasikan anggaran lebih dari Rp. 100.000.000.000, (Seratus Milyar Rupiah) untuk membuka akses transportasi barang, jasa dan orang antar wilayah.

Kondisi ini sangat penting mengingat luasnya wilayah Kabupaten Wajo yang sangat potensial untuk dikembangkan dan penghasil produksi pertanian dan membuka akses pariwisata terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada

tahun 2013 kondisi jalan baik sepanjang 484,19 Km dengan panjang jalan Kabupaten Wajo yaitu 1,008.62 Km. Dimana pada tahun 2014 ini, telah diadakan perbaikan, pembangunan jalan sehingga panjang jalan yang baik menjadi 532,12 Km atau mengalami penambahan jalan baik sepanjang 47,932 Km. Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Wajo ditargetkan di Tahun 2014 sebesar 48%, dan terealisasi sebesar 52,76%. Nilai capaian kinerja indikator kinerjanya sebesar 109,92% yang dikategorikan kinerja sangat tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Panjang Jalan dengan Kondisi Baik
Kabupaten Wajo 2013-2014

2013	2014
484,19 Km	532,12

Sumber: www.wajokab.go.id

Dari capaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa sudah adanya upaya dari pemerintah kabupaten wajo untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk akses kunjungan wisatawan. Namun hal demikian masih dirasakan kurang. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata Drs. Faisal pada tanggal 27 Mei beliau menjelaskan:

> "*Pelayanan yang saat ini kami sediakan untuk para wisatawan, hanya bisa memudahkan aksesibilitas menuju objek-objek wisata saja. Untuk saat ini kami baru saja memperbaiki jalan menuju beberapa objek wisata. Kalau bicara sewajarnya, hal ini masih dirasa kurang. Karena untuk menarik minat para wisatawan, kita tentu harus memberikan pelayanan yang lain seperti: kendaraan untuk mobilitas* massal, *tempat peristirahatan dan lain sebagainya. Namun untuk kedapannya kami insyaalllah akan menganggarkan itu untuk menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara.*"

Berdasarkan hasil wawancara diatas. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata selaku penanggungjawab dan pelaksanan kebijakan daerah masih dirasa sangat minim. Sehingga untuk tahun berikutnya pemerintah Kabupaten wajo akan berusaha untuk menganggarkan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata lainya.

Tabel 3.5
SARANA dan PRASARANA DESA WISATA SALOMENRALENG KABUPATEN WAJO

No.	Fasilitas	Kuantitas	Keterangan
1.	Rumah terapung (rumah singgah)	32 rumah	5 rumah penginapan, 27 rumah warga
2.	Aula	1 rumah	Layak pakai
3.	Perahu/*ketinting*	22 buah	Layak pakai
4.	Toilet	34 unit	Layak pakai
5.	Warung/ kedai	22 unit	Setiap rumah terapung menyediakan warung sendiri

Sumber: disporabudpar Kabupaten Wajo 2014

Hal ini juga ditegaskan oleh kepala desa Salomenraleng Pak Andi Nawasir pada tanggal 6 Juni 2016 beliau menjelaska:

> "*Ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Objek wisata desa kami ini semenjak bertambahnya perahu atau katinting dan alat keselamatan selama perjalanan sudah tersedia seperti pelampung, dll tidak seperti dulu dengan perahu dan peralatan yang apa adanya sehingga pengunjung merasa was-was dengan keselamatannya. Tapi alhamdulillah, dari hasil koordinasi kami dengan pemerintah terkait perbaikan infrsatruktur jalan diterima. Dikabulkan dengan APBD 2013. Dari situ kami juga intens mempromosi objek wisata melalui bantuan pemuda dan pemudi lewat social media dan pameran yang digelar oleh pemerintah daerah*".

Dari wawancara diatas sudah adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan dinas pariwisata. Hal ini terlihat dari adanya langkah serius yang dilakukan pemerintah dengan mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju akses desa wisata Salomenraleng ini. Sehingga memudahkan wisatawan untuk menjangkau objek wisata desa Salomenraleng.

3. Aspek Responsivitas

Rensponsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintah atau publik dalam memahami kebutuhan masyarakat sekitar. Bentuk pemahaman pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kemudian dengan cara menyusun agenda prioritas yang sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada disekitar objek wisata tentu diperlukan kemampuan khusus dari pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini tentu dapat diukur menurut bentuk pelayanan yang diberikan kepada pegawai. Semakin banyaknya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga akan berimplikasi baik dalam menyampaikan informasi serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa wisata. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata Drs. Faisal pada tanggal 27 Mei 2016 beliau menjelaskan:

"Dalam memberikan informasi ke masyarakat Desa Wisata kami melaksanakan berupa sharing informasi terkait kegiatan promosi dan perlombaan yang sifatnya tidak terbatas, informasi tersebut diberikan melalui pengelola Desa sekitar Wisata seperti kepala lurah atau perangkat desa lainnya yang nantinya menyampaikan kepada masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam rangka upaya pemberian bantuan kepada masyarakat, hal yang sudah dilakukan adalah melakukan *sharing* informasi tentang kegiatan kepada masyarakat desa wisata. Salah satu contoh ialah pemberian bantuan promosi, jika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kabupaten, provinsi, maupun nasional, maka pihak Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan kepada perangkat desa sebagai delegasi masyarakat yang dilakukan pada pertemuan rutin

Sebagai mana yang disampaikan wawancara Kepala Desa Salomenraleng Pak Andi Nawasir pada tanggal 12 Juni 2016 beliau menjelaskan:

> *"Menurut saya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo selama ini sudah menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan saat ini sudah baik, karena didukung dengan adanya aparatur pemerintah Desa sebagai penengah antara pihak Dinas Pariwisata dan masyaakat, serta lebih pula dengan adanya sosial media seperti facebook dan lain-lain."*

Akan tetapi pernyatan tersebut kurang didukung oleh Pak Andi Rizal dari Desa Wisata Pakkana, yang mengatakan bahwa:

> *"kalau menurut saya informasi yang diberikan Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo saat ini masih kurang, karena untuk beberapa even Dinas Pariwisata masih kurang koordinasi dengan pihak apparat desa".*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Salomenraleng informasi yang diberikan oleh Disporabudpar Kabupaten Wajo dinilai sudah baik karena didukung oleh aparatur Desa Wisata dan jejaringan sosial.

Informasi tersebut sifatnya tidak terbatas. Akan tetapi menurut salah satu Desa Wisata, informasi yang diberikan Disporabudpar dinilai masih kurang karena kurangnya koordinasi dengan pihak aparat Desa Wisata khusus untuk beberapa even. Mungkin karena dinas pariwisata itu sendiri menfokuskan mengembangkan desa wisata Salomenralleng.

Berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa informasi yang diberikan pihak Dinas terkait penyelenggaraan kegiatan sudah baik, akan tetapi ada pula masyarakat Desa Wisata menilai bahwa informasi yang diberikan pihak Dinas masih kurang karena koordinasi dengan aparat pemerintah desa terkait beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan masih kurang seperti yang dikatakan oleh perwakilan dari desa wisata Pakkana.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat satu hal yang tidak bisa dilupakan yaitu menanggapi kritikan dan keluhan dari masyarakat karena jika hal tersebut dilaksanakan maka akan berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan dari berbagai kritik dan saran yang muncul, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

4. Aspek Responsibilitas

Pada bagian definisi oprasional peneliti menjadikan responsibitas sebagai alat ukur untuk melihat kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada aspek ini, kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo dapat dinilai berhasil jika pelaksanaan kegiatan telah mangacu pada visi dan misi dinas dalam pengembangan objek wisata yang ada. Salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten Wajo **"*Wajo sebagai Daerah wisata, berbudaya serta kepemudaan dan Keolahragaan yang berdaya saing*"**. Pemerintah kabupaten wajo mengoptimalkan kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah dengan lembaga swasta sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2014-2019 dibawah ini:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan, meningkatkan kerjasama pembangunan kemitraan pariwisata	- Meningkatnya SDM pengelola kepariwisataan. - Terwujudnya kerjasama kemitraan dalam pembangunan pariwisata	Memperkuat upaya pengelolaan daya Tarik wisata menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata anatara pemerintah dengan lembaga swasta atau pemerintah

Sumber: Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014-2019

Dapat dilihat dari tabel diatas kebijakan optimalisasi kemitraan adalah tujuan untuk pengembangan objek Wisata yang terdapat pada Kabupaten Wajo, dari situ dapat disimpulakan pemerintah lebih berupaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan mitra – mitra pariwisata dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaku pariwisata yang nantinya diharapkan berdampak baik peningkatan kualitas daya tarik wisata Kabupaten wajo.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata Drs. Faisalpada tanggal 27 Mei 2016 beliau menjelaskan:

"*Selama ini untuk pencapaian visi menjadikan wajo sebagai objek wisata yang memiliki daya saing kami membuat kebijkan dalam bentuk membuat kerjasama bersama pihak swasta terutama, namun tidak bisa dipungkiri juga di ada daridDinas lain kemudian bersedia membantu kami. Karena selain itu kami juga selalu mengajak masyarakat untuk terus menerus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas suberdaya alam menjadi objek wisata. Sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan dampak baik yang baik untuk peningkatan aspek yang lain seperti aspek ekonomi masyarakat*."

Berdasarkan pada wawancara diatas pemerintah kabupaten Wajo dalam Hal ini yang bertindak Dinas Pemuda, Olahraha, Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan kebijakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun pada dasarnya peran masyarakat dan pihak swasta tetap menjadi prioritas SDM yang ikut serta meningkatkan kualiatas dan kuantitas objek wisata yang ada di kabupaten Wajo.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata pada kebijakan pengembangan melalui kemitraan, ada beberapa faktor mendukung yaitu potensi wisata yang terdapat pada Kabupaten Wajo sangat berlimpah, seperti potensi alam, budaya dan kerajinan. Dimana potensi tersebut sangat mendukung untuk mengembangkan sektor kepariwisataan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pemuda yang ada di desa Salomenralleng yang bernama Hendrik pada tanggal 05 Juli 2016 mengatakan bahwa:

"*Untuk kemajuan desa, terutama dari segi wisata, kami pemuda sering sekali di ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Wajo khususnya di desa Salomenraleng Danau Tempe ini yang setiap tahunnya mempunyai even maccera tappareng. Seperti kegiatan promosi pada acara pameran budaya, festival budaya, kami dari pemuda desa sering dilibatkan, kemudia pelestarian tanaman yang sudah mulai langka, pembuatan area parker untuk para pengunjung, menyedia stand-stand untuk*

para pedagang yang berasal dari desa ini sendiri dan pedagang dari luar, Tapi selain kami juga ada beberapa pengusaha yang ikut serta menjadi mitra dalam rangka memperkenalkan produk wisata yang ada di desa ini demi kesejahtraan penduduk desa dan kenyamana bagi para pengunjung."

Berdasarkan pada wawancara langsung diatas, sudah adanya bentuk tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata baik kepada masyarakat desa wisata maupun pengunjung selaku wisatawan yang datang menikmati kekayaan alam yang ada di desa Salomenralleng salah satu bentuk dari rasa tanggungjawab pemerintah adalah menyediakan rumah singgah demi kenyamanan para pengunjung dan menyediakan stand untuk para pedagang yang berasal dari desa Salomenraleng.

Namun yang menjadi hambatan adalah Sumberdaya Manusia baik aparatur maupun operator pelaksana yang masih minin baik dilihat dari jenjang pendidikan atau dari aspek lainnya. Sehingga sampai saat ini beberapa program belum memungkinkan untuk dilaksakana dan di alihkan untuk pengembangan tenaga SDM yang ada.

5. Aspek Akuntabilitas

Pada bagian definisi oprasional peneliti juga menjadikan akuntabilitas sebagai alat ukur untuk melihat kinerja Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Wajo terhadap sektor pariwisata adalah menunjukan seberapa besar konsistensi kebijakan dan kegiatan organisasi publik dengan kehendak dan kemauan masyarakat. Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan menjadi hal yangs sangat penting. Disamping itu akuntabilitas dapat dilihat secara eksternal yaitu kinerja dari organisasi publik sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat sehingga dengan demikian setiap kegiatan atau program yang dijalankan mengacu kepada norma ataupun nilai yang melekat pada masyarakat karena seperti yang diketahui bahwa berdasarkan prinsip demokrasi dimana pemerintahan itu berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Terlaksananya kebijakan pemerintah tentu tidak terlepas dari sosialiasi dan komunikasi baik yang disampaikan kepada masyarakat. Hingga saat ini komunikasi penyampaian kebijakan kepada masyarakat desa wisata sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana disampaikan oleh Kepala desa Salomenralleng Danau Tempe Pak Andi Nawasir pada tanggal 6 Juli 2016 beliau menjelaskan:

"*Selama ini pelaksanaan kegiatan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah dibuat dari hasil saran dan masukkan dari para warga. Meskipun belum semuanya terakomodir. Dan sosialisasi dari pemeritah terkait kebijakan untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di desa Salomenraleng Danau Tempe ini terkadang hanya disampaikan melalui kami saja selaku pemerintah desa, tapi ada juga sebagian yang langsung kemasyarakat."*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan penyampain informasi dari pemerintah sudah terjalin dengan baik, sehingga dalam implementasi kebijakan terkait peningkatan potensi objek wisata sejalan dengan apa yang harapkan masyarakat wisata.

Meskipun komunikasi antara Dinas dan masyarakat Desa Wisata Salomenraleng Danau Tempe sudah terjalin cukup baik dengan adanya faktor pendukung seperti peran aktif pemuda Desa Wisata dan Forum Komunikasi Desa wisata. Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya masih terdapat Desa Wisata yang menganggap komunikasi yang terjalin antara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata masih kurang. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang terjalin saat ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aparatur dan masyarakat Desa Wisata tersebut. Sehingga masih sering terjadi perbedaan perspektif antara pihak Dinas dan masyarakat Desa Wisata yang ada di Kabupaten Wajo.

Setelah terlaksananya beberapa kegiatan dari program yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda, Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas atau instansi berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait program dan kegiatan kepada Pemerintah Daerah seperti even yang diadakan di desa Salomenraleng setiap tahunnya yaitu *maccera tappareng (mensucikan danau)* yang menghabiskan biaya cukup besar. Hal tersebut penting karena untuk mengetahui bagaimana peningkatan kinerja suatu instansi setiap tahunnya melalui program dan kegiatan yang telah

diselenggarakan. Adapun proses pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo, yaitu:

Gambar 3.1

Alur Proses Pertanggungjawaban Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

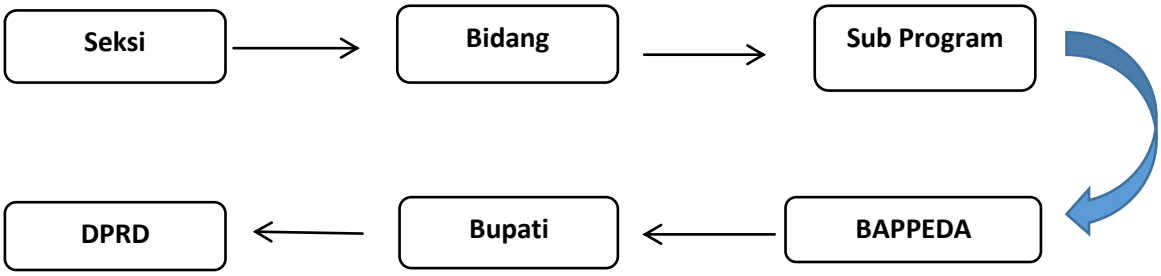

Dari bagan diatas dapat dilihat skema pertanggungjawaban dan pelaporan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata selaku implementator kebijakan dalam rangka peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Wajo dimulai dari Seksi selalu eksekutor melaporkan hasil dan perkembangan dari kegiatan yang sudah dilakukan kepada kepada Bidang dalam hal ini sebagai salah satu perumus arah kebijakan. Dari kepala bidang inilah kemudian dilaporkan perkembangan dari pelaksanaan kegiatan kepada Subbagian proram yang dalam hal ini sebagai leading organisasi dilingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah pelaporan antar bagian dalam organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata, kemudian pelaporan disampaikan kepada leading organisasi yang berada dilingkungan pemerintah daearah yaitu kepada

BAPPEDA dalam hal ini bertindak sebagai organisasi perencanaan. Dari BAPPEDA kemudian melaporkan kepada Bupati selaku pimpinan daerah yang menetapkan visi dan misi daerah. Barulah kemudian dilaporkan kepada DPRD selaku perwakilan rakyat yang menilai hasil kinerja pemerintah.

Dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban dari setiap program dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten Wajo dimuatkan dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diserahkan setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Pada aspek akuntabilitas diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas Pariwisata Kabupaten Wajo dengan masyarakat Desa Wisata Salomenraleng Danau Tempe. Meskipun begitu jika dilihat berdasarkan akuntabilitas lainnya, Dinas Pariwisata sudah berupaya mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan terkait pengembangan Desa Wisata Kabupaten Wajo setiap tahunnya, dengan membuat laporan akhir kinerja instansi pemerintah yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.